

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DI
WILALAYAH JAWA TENGAH**

**(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2011-2013)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

YULITA NURUL HIDAYATI

B 200 120 043

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DI
WILAYAH JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2011-2013)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

YULITA NURUL HIDAYATI

B 200 120 043

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Zulfikar, S.E, M,Si)

PENGESAHAN

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DI
WILAYAH JAWA TENGAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2011-2013)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Yang ditulis oleh:

YULITA NURUL HIDAYATI

B 200 120 043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 2 November 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Zulfikar, S.E, M,Si ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Atwal Arifin, Ak, M.Si, CA ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dra. Rina Trisnawati, M.Si,Ph.D,Ak,CA ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Drs. Triyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya tersebut, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Februari 2017

Yang menyatakan,



YULITA NURULHIDAYATI

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DI
WILAYAH JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2011-2013)**

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari www.bpk.go.id, www.bps.go.id, dan www.djpk.go.id. Metode analisis data menggunakan analisis regresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Kompleksitas, dan Belanja Modal secara signifikan berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Sedangkan variabel PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

Kata Kunci: *Kelemahan Pengendalian Intern, Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, dan Belanja Modal.*

Abstract

The purpose of this study was to examine the size of the local government, economic growth, regional income, complexity and capital expenditures to internal control weaknesses. Population in this study is the district and provincial city of Central Java totaling 35 districts/cities. Data used in this research is secondary data obtained from www.bpk.go.id, www.bps.go.id, and www.djpk.go.id. Based on the result of analysis show that the variable size of local government, the complexity, and capital expenditure significantly affect internal control weaknesses. While variable PAD and economic growth does not affect the internal control weaknesses.

Keywords: *Internal Control Weaknesses, Size of Local Government, Economic Growth, Complexity, PAD, and Capital Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah ibarat perusahaan merupakan sebuah bentuk tantangan organisasi kompleks yang mencakup segala bidang yang berhubungan dengan masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan dan pembagian wewenang, system pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah. Selama ini sektor public tidak

luput dari tuding sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme inefisiensi dan sumber pemborosan Negara.

Organisasi sector public pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang bersumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah dimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih atau good governance. Untuk menciptakan pengendalian sistem yang baik, pemerintah harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Pengendalian intern dibuat untuk semua tindakan pada sebuah organisasi guna memberikan keamanan terhadap asset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2015) yang meneliti mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah kabupaten/kota wilayah Indonesia bagian barat tahun 2012).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periode penelitiannya. Objek penelitian sebelumnya adalah pada pemerintah kabupaten/kota wilayah Indonesia bagian barat. sedangkan untuk penelitian ini adalah Badan Pusat Statistika (BPS) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2011-2013 yaitu tiga tahun.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Tricker (1984) dalam penelitian Putri (2015) teori keagenan menjelaskan tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri ser

memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Pengendalian Internal

Menurut IAI (2011) pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memandai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan c)kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kelemahan Pengendalian Internal

Menurut Warren (2003) dalam putri (2015) menyatakan bahwa kelemahan pengendalian intern dapat dilihat dai tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi jalannya sistem penendalian intern dalam organisasi pemerintah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Sumardjo (2010) ukuran pemerintah daerah merupakan sesuatu yang mencerminkan salah satu karakteristik dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Larrasty (2013) pertumbuhan adalah perubahan yang diukur dalam besar atau jumlah. Pertumbuhan pemerintah daerah mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari suatu periode ke periode berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatn daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan kedailan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensidaerah.

Kompleksitas Daerah

Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh man unit-unit organisasi tersebar secara geografis untk mencapai tujuannya.

Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2006 mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, kemudian asset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Martani dan Zaelani (2011), dalam penelitiannya tentang Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Sampel penelitian ini 229 Pemerintah Daerah di Indonesia tahun (2008). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.

Penelitian Larrasty, et al (2013) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan sampel penelitian Pemerintah Daerah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan periode penelitian tahun (2009-2010). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah, Jumlah penduduk, dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan Pengendalian internal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan Pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan sampel pemerintah daerah seluruh Indonesia yang berjumlah 156. Hasil pengujian menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian intern Pemerintah Daerah. Sedangkan kompleksitas Pemerintah Daerah dilihat dari jumlah SKPD berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset atau aktiva dipahami sebagai harta total. Daftar aset atau aktiva di dalam neraca disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid.

H₁: Ukuran berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator atas keberhasilan pembangunan daerah.

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dalam jumlah yang tidak terlalu

besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi (Putri. 2015).

H₃: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Jumlah penduduk adalah semua orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (Larasati, 2013).

H₄: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.

H₅: Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran seluruh provinsi di Jawa Tengah, laporan PDRB, jumlah penduduk, dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pemerintah daerah tahun 2011-2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009:116) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pemeriksaan yang memiliki data jumlah temuan/kasus atas kelemahan pengendalian intern.
- b. Laporan hasil pemeriksaan yang memiliki realisasi anggaran..

Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah gambaran seberapa besar atau kecil skala pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan total asset yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Tengah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa mengundangi apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak.

c. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Pasal 6 ayat 1).

d. Kompleksitas

Kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan. Kompleksitas daerah bias diukur dengan jumlah penduduk yang ada disuatu daerah.

e. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belasa bulan, kemudian asset digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Metode Analisis

Uji Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, dan Belanja Modal terhadap kelemahan pengendalian intern pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2011--2013. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{KPI} = \alpha + \beta_1 \text{UK} + \beta_2 \text{PE} + \beta_3 \text{PAD} + \beta_4 \text{K} + \beta_5 \text{BM} + e$$

Keterangan:

KPI : Kelemahan Pengendalian Intern

α : Konstanta

UK : Ukuran

PE : Pertumbuhan Ekonomi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

K : Kompleksitas

Bm

β : Koefisien Regresi atau slope

e : *standar error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi berganda. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	13,560			
Ukuran Pemerintah Daerah	-8,759	-2,064	0,027	H ₁ diterima
Pertumbuhan Ekonomi	-0,066	-0,863	0,391	H ₂ ditolak
Pendapatan Asli Daerah	4,001	0,685	0,495	H ₃ ditolak
Kompleksitas	-3,226	-2,578	0,012	H ₄ diterima
Belanja Modal	1,751	2,740	0,007	H ₅ diterima

Sumber: Data sekunder diolah,2016.

Dari tabel tersebut dapat dibuat formula:

$$\text{KPI} = 13,560 - 8,759\text{UK} - 0,066\text{PE} - 4,001\text{PAD} - 3,226\text{K} + e$$

Untuk menginterpretasikan model yang diperoleh dari analisis tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 13,560 dengan parameter positif menunjukkan bahwa hubungan yang searah antar variable Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas dan Belanja Modal dengan Kelemahan Pengendalian Intern.
- b. Koefisien regresi Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan koefisien yang negatif sebesar -8,759, hal ini menunjukkan setiap kenaikan dari Ukuran Pemerintah Daerah akan menurunkan Kelemahan Pengendalian Intern sebesar 8,759. Sebaliknya, setiap penurunan dari Ukuran Pemerintah Daerah akan meningkatkan Kelemahan Pengendalian Intern sebesar 8,759.
- c. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan koefisien yang negatif sebesar -0,066, hal ini menunjukkan setiap kenaikan dari Pertumbuhan Ekonomi akan menurunkan Kelemahan Pngendalian Intern sebesar 0.066. Sebaliknya, setiap penurunan dari Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan Kelemahan Pengendalian Intern sebesar 0,066.
- d. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan koefisien yang positif sebesar 4,001 hal ini menunjukkan setiap kenaikan PAD akan meningkatkan Kelemahan Pengendalian Intern sebesar 4,001. Demikian juga, setiap penurunan PAD akan menurunkan Kelemahan Pengendalian Intern sebesar 4,001.

- e. Koefisien regresi belanja modal dengan parameter positif sebesar 1,751 hal ini menunjukkan setiap kenaikan dari belanja modal akan meningkatkan kelamahan pengendalian intern sebesar 1,751. Demikian juga, setiap penurunan belanja modal akan menurunkan kelemahan pengendalian intern sebesar 1,751.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kelamahan Pengendalian Intern. Sedangkan Kompleksitas dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelamahan Pengendalian Intern.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas penelitian. Adapun saran yang perlu untuk disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti dapat menambah periode tahun anggaran tidak hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari tahun ke tahun.
2. Diharapkan bagi peneliti berikutnya menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder saja hendaknya melakukan konfirmasi langsung pada daerah yang menjadi obyek penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012*. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Data Jumlah Penduduk kabupaten/kota tahun 2011-2013. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Data PDRB Provinsi Jawa Tengah 2011-2013. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Direktorat Jenderal Departemen Keuangan. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 2011-2013. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Direktorat Jenderal Departemen Keuangan. Data Realisasi APBD Jawa Tengah 2011-2013. Diakses pada 22 Maret 2016.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartono, Rudi, Amir Mahmud, dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”. Symposium Nasional Akuntansi XVII.
- Larrasati, Rimona, Ratna Anggraini, dan Ety Gurendrawaty. 2013. “ Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2009-2010”. Symposium Nasional Akuntansi XVI.
- Nirmala, Swastia. (2012). *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan pengendalian Intern*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.
- Martani dan Zaelani. (2011). *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Symposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.

- Nurwati, Ika. 2015. "Analisis factor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerinah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). Skripsi. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Permendagri No 13 Tahun 22006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Peemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Puspitasari, Titus. 2013. "Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia)". Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putri, Kumala Novi. 2015. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Negerei Semarang.
- Saputro, Eko Adi dan Amir Mahmud. 2015. "Anlisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Trenggonowati. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta:BPFE.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yeni, Efrida, Popi Fauziti dan Nurhuda N. 2014. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat 201-2012)". Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta.